

**KONFLIK DALAM WACANA PERLUASAN TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR (TPA) NGRONGGO KOTA SALATIGA TAHUN 2024-2025**

Azzahra Nindya Ningrum, Nunik Retno Herawati
Email: zahranindya27@gmail.com

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Population growth in Salatiga City has led to an increase in the volume of waste at the Ngronggo Final Disposal Site (TPA) in Salatiga City. As a result, the Ngronggo TPA has experienced overload capacity, prompting the Salatiga City Government to discuss expanding the land to extend the life of the Ngronggo TPA. This plan has caused conflict between the government and the community surrounding the landfill, as there are concerns that it will have a negative impact on the community's life. The purpose of this study is to analyze the Ngronggo landfill conflict in 2024–2025, identify the factors causing the conflict, and examine the government's efforts to resolve the conflict. The research method used in this study is descriptive qualitative with techniques of interviews, observation, documentation, and data analysis through coding and source triangulation. Based on the results of the study, the Ngronggo landfill conflict occurred due to a misunderstanding between the government and the community regarding the expansion plan. The conflict was exacerbated by aggravating factors, including garbage flying from garbage trucks, rude drivers, unfulfilled compensation promises, lack of communication between the government and the community, and the community feeling neglected by the government because their concerns were not addressed quickly. The government attempted to resolve the conflict through dialogue, negotiation, and mediation. These efforts were able to temporarily ease tensions, but there is still a possibility of unrest if the results of the negotiations and mediation are not properly implemented by the government. This study emphasizes that community participation in the planning process, transparency of information, and improvement of the waste management system are crucial efforts in preventing future conflicts.

Keywords: *Conflict, Waste Management, Conflict Resolution*

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Salatiga menjadi penyebab peningkatan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngronggo Kota Salatiga. Akibatnya TPA Ngronggo mengalami *overload capacity* yang memunculkan wacana dari Pemerintah Kota Salatiga untuk melakukan perluasan lahan untuk memperpanjang umur TPA Ngronggo. Rencana tersebut menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat sekitar TPA karena dikhawatirkan akan membawa pengaruh negatif kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konflik TPA Ngronggo pada tahun 2024–2025, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, serta mengkaji upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis data melalui proses *coding* dan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian, konflik TPA Ngronggo terjadi karena adanya ketidaksepahaman tujuan antara pemerintah dengan masyarakat atas wacana perluasan. Konflik diperparah karena adanya faktor yang memperburuk diantaranya sampah yang berterbangan dari truk pengangkut sampah, sikap sopir yang tidak sopan, janji kompensasi yang tidak ditepati, kurangnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat serta msayarakat merasa diabaikan pemerintah karena keresahan tidak ditangani dengan cepat. Pemerintah berupaya melakukan penyelesaian konflik melalui pendekatan dialog, negosiasi, dan mediasi. Upaya penyelesaian konflik mampu meredakan ketegangan sementara tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi gejolak jika hasil negosiasi dan mediasi tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Penelitian ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, transparansi informasi, serta peningkatan sistem pengelolaan sampah merupakan upaya krusial dalam mencegah konflik di masa mendatang.

Kata Kunci: Konflik, Pengelolaan Sampah, Resolusi Konflik

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia menjadi isu penting yang selalu menjadi pembahasan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara. Populasi penduduk yang semakin besar dan terus bertambah menjadi tantangan bagi negara. Fenomena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menjadi isu yang harus ditangani dengan tepat. Pertumbuhan penduduk menjadi tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia.

Menurut World Population Review, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan penduduk terbanyak setelah India, China dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai 281.603,8 juta jiwa dan mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 1,11%. Pertumbuhan penduduk didorong karena berbagai faktor diantaranya angka kelahiran yang relatif tinggi, peningkatan harapan hidup dan urbanisasi yang turut berkontribusi dalam pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi dengan pesat memberikan dampak

positif sekaligus memberikan dampak negatif bagi suatu negara (Tampubolon, 2022). Pada satu sisi, laju pertumbuhan penduduk memberikan dampak positif pada bonus demografi dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Namun, di lain sisi laju pertumbuhan penduduk memberi dampak negatif dan tantangan pada penyediaan lapangan pekerjaan, fasilitas, pendidikan serta infrastruktur. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan penduduk yaitu masalah persampahan.

Permasalahan sampah selalu menjadi topik hangat yang dibicarakan di lingkungan perkotaan. Terlebih lagi, kota menjadi tempat pilihan bagi masyarakat untuk tinggal atau menetap, mencari pekerjaan dan memperbaiki taraf kehidupan. Banyak orang lebih memilih tinggal di perkotaan dengan alasan kemudahan akses dibandingkan tinggal di pedesaan. Namun, banyaknya orang yang memilih tinggal di perkotaan juga akan menimbulkan masalah yang semakin kompleks. Semakin bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka akan menimbulkan masalah-masalah yang akan terjadi di daerah tersebut salah satunya masalah persampahan yang terjadi di Kota Salatiga.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Argomulyo	50.264	51.542	52.045	51.376	51.573
Tingkir	46.838	47.699	48.106	47.206	47.256
Sidomukti	45.054	45.764	46.125	45.634	45.714
Sidorejo	54.284	55.215	55.093	54.755	54.807
Jumlah	196.440	200.220	201.369	198.971	199.350

Salatiga Per Kecamatan

Sumber: Publikasi Dataku Kota Salatiga
Tahun 2025

Peningkatan jumlah penduduk di Salatiga akan dibarengi dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari. Banyaknya masyarakat yang tinggal di Salatiga menjadi pendukung peningkatan volume sampah. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga volume produksi sampah setiap harinya bisa mencapai 80 ton/hari atau 385m³/ hari yang dihasilkan dari penduduk baik dari perumahan, pasar, dan sebagainya yang menunjang penambahan volume produksi sampah setiap hari. TPA Ngronggo menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir yang dipilih oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk menampung sampah masyarakat Kota Salatiga setiap hari.

Tabel 2. Timbulan Sampah Kota

Salatiga		
Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2020	114.03	41.620
2021	112.24	40.969
2022	114.16	41.668
2023	116.43	42.496
2024	116.79	42.629

Sumber: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2024

Saat ini, TPA Ngronggo telah mengalami *overload capacity* karena banyaknya volume sampah yang ditampung oleh TPA setiap harinya melebihi kapasitas. Munculnya permasalahan *overload capacity* ini terjadi karena tidak berjalannya penanganan sampah dengan optimal. Adanya permasalahan *overload capacity* yang terjadi di TPA Ngronggo mengharuskan pemerintah Kota Salatiga untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengangani sampah karena sampah akan terus berdatangan setiap harinya. Sehingga, pemerintah berencana untuk melakukan perluasan TPA guna mengurai sampah yang kian menumpuk setiap harinya.

Adanya wacana perluasan di TPA Ngronggo menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar dengan pemerintah. Warga sekitar bersikeras untuk tidak dilakukan perluasan di TPA Ngronggo. Warga merasa dengan kondisi TPA saat ini sudah menimbulkan banyak dampak negatif dan keresahan bahkan kerugian bagi

masyarakat sekitar. Bagi pemerintah, perluasan TPA diperlukan untuk dapat mengatasi keterbatasan kapasitas daya tampung TPA karena peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan penduduk kota. Namun, warga menilai rencana perluasan akan menambah timbulnya dampak negatif seperti penurunan kualitas udara, pencemaran dan muncul potensi masalah kesehatan. Warga merasa bahwa perluasan akan semakin mengganggu kenyamanan hidup mereka.

KAJIAN TEORI

a. Konflik

Menurut Coser, konflik memiliki potensi positif dalam membentuk dan mempertahankan struktur masyarakat. Coser menjelaskan bahwa terdapat keuntungan atau sisi positif dari adanya konflik dimana konflik dapat memperkuat struktur dalam masyarakat saat terjadi gesekan dari kelompok luar (*out group*).

Lewis A. Coser seperti dikutip oleh Joseph P. Folger dan Marshal S. Poole (1984) membagi konflik menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. **Konflik Realistik**, berasal dari perbedaan dan ketidaksepahaman cara untuk mencapai tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam jenis konflik ini, interaksi konflik memfokuskan pada isu

ketidaksepahaman mengenai substansi atau objek konflik yang seharusnya diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pada konflik ini, metode manajemen konflik yang digunakan adalah dengan menggunakan dialog, persuasi, musyawarah, voting, dan negosiasi.

2. **Konflik Non-Realistik**, konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini terjadi dipicu karena kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong untuk melakukan agresi untuk dapat mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik tidaklah menjadi hal yang penting. Hal penting yang menjadi fokus adalah bagaimana untuk bisa mengalahkan lawan. Pada konflik ini, metode menajemen konflik yang digunakan adalah agresi dengan menggunakan kekuasaan, kekuatan dan paksaan.

Secara keseluruhan, konflik realistik dan non realistik terdapat perbedaan dalam penyebab terjadinya konflik. Dalam konflik realistik terjadi karena adanya perbedaan dan ketidaksepahaman dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan, pada konflik non realistik terjadi dipicu karena adanya kebencian dan prasangka terhadap

lawan konflik yang mendorong untuk mengalahkan lawan konflik dengan agresi.

b. Penyebab Konflik

Konflik tidak muncul begitu saja melainkan terdapat faktor-fakor penyebab yang melatarbelakangi munculnya konflik. Terjadinya konflik disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut (Dr. Benjamin M., 2017) adapun faktor penyebab konflik dapat dibedakan dalam berbagai jenis, yait:

1. *Triggers (pemicu)*

Peristiwa yang memicu terjadinya suatu konflik.

2. *Pivotal factors or root causes (faktor inti atau penyebab dasar)*

Faktor inti dari terjadinya konflik atau akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik yang terjadi.

3. *Mobilizing factors (faktor yang memobilisasi)*

Masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan perlawanan.

4. *Aggravating factors (faktor yang memperburuk)*

Faktor tambahan yang memperburuk terjadinya konflik.

c. Resolusi Konflik

Dalam proses resolusi konflik agar terjadi suatu penyelesaian Fisher (2000: 112-113) menyatakan bahwa perlu adanya:

1. Memfasilitasi Dialog

Di dalam proses mengelola konflik diperlukan usaha-usaha untuk mendapatkan berbagai cara dalam meningkatkan terjadinya dialog diantara pihak-pihak yang berkonflik (Fisher 2001:113). Terkadang dialog menjadi hal yang diabaikan saat kondisi emosi memuncak. Dialog menjadi keterampilan yang berguna di awal sebelum situasi konflik berkembang sampai pada tahap krisis atau puncak.

2. Negosiasi

Keterampilan negosiasi dalam situasi konflik maka negosiasi dapat diartikan sebagai suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog berkaitan dengan isu-isu dimana masing-masing pihak mempunyai pendapat yang berlaianan (Fisher, 2001:115). Negosiasi berlangsung diantara kedua belah pihak yang berkonflik pada tahap awal suatu konflik dimana pada saat jalur komunikasi antara kedua pihak belum benar-benar terputus.

3. Mediasi

Mediasi menjadi bagian dari penyelesaian konflik yang telah lama diterapkan dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Mediasi diterapkan dalam menyelesaikan konflik di berbagai hal termasuk konflik sosial. Tujuan dilakukannya mediasi adalah mencapai kesepakatan atau solusi tentang objek konflik yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator berfungsi sebagai fasilitator bukan sebagai pengambil keputusan.

4. Arbitrase

Arbitrase menjadi alternatif yang diterapkan dalam menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi. Penggunaan arbitrase dianggap lebih cepat dan biayanya lebih murah serta bagi kedua belah pihak yang berkonflik bisa mengontrol resolusi konflik yang dihasilkan dari proses arbitrase. Menurut Cristopher W. Moore (2003) menyatakan arbitrase dalam istilah umum adalah suatu proses di mana seseorang diminta bantuannya dalam konflik secara sukarela sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan netral untuk membuat keputusan bagi mereka yang berkonflik mengenai isu-isu yang dipermasalahkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dekriptif peneliti akan melakukan penggambaran objek dimulai dari pemicu atau penyebab terjadinya hingga resolusi konflik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui data-data yang diperoleh. Fakta, data, fenomena dan kegiatan yang dilaksanakan dianalisis dengan cara deskriptif hingga mencapai suatu kesimpulan dalam penelitian. Metode kualitatif deskriptif diharapkan dapat membantu penelitian yang dilakukan di Kota Salatiga khususnya untuk mendalami dinamika konflik yang terjadi atas wacana pemerintah untuk melakukan perluasan TPA Ngronggo Kota Salatiga.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif sehingga jenis data yang disajikan cenderung menggunakan rangkaian kata, urutan peristiwa, foto, tindakan dan uraian naskah secara detail. Hal ini dilakukan karena aktivitas manusia seperti perilaku, tindakan dan gagasan yang diteliti tidak dapat diukur dengan angka. Data yang diperoleh dalam penelitian menjadi penguatan argumen peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik TPA Ngronggo Kota Salatiga

Permasalahan TPA Ngronggo Kota Salatiga mulai mencuat pada tahun 2019 ketika data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat timbulan sampah di Kota Salatiga mencapai 30.550 ton per tahun (Jatengprov.go.id,2019). Sejak saat itu, Pemerintah Kota Salatiga menyadari bahwa daya tampung TPA tidak akan mencukupi dalam jangka waktu yang panjang. Pada tahun 2019 ini masyarakat sekitar TPA Ngronggo mulai merasakan dampak lingkungan berupa bau dan penurunan kualitas udara. Permasalahan ini menandai awal mula keresahan masyarakat terkait penanganan sampah di TPA Ngronggo. Situasi pada tahun ini menjadi fondasi awal munculnya konflik berkepanjangan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar TPA Ngronggo.

Pemasalahan sampah tidak berhenti pada tahun 2019, memasuki tahun 2020 permasalahan persampahan masih terus berlanjut. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga melaporkan bahwa sampah yang masuk ke TPA Ngronggo mencapai 80 ton/ hari. Pada tahun 2020, kapasitas daya tampung TPA Ngronggo mulai mengalami keterbatasan hingga diperkirakan TPA Ngronggo hanya mampu menampung

sampah 3-4 tahun saja. Pada tahun 2021, jumlah sampah yang masuk ke TPA Ngronggo meningkat hingga mencapai 90 ton/ hari. Gunungan sampah yang semakin tinggi menimbulkan keresahan masyarakat sekitar TPA Ngronggo. Masyarakat sekitar semakin sering menyuarakan keresahan mereka melalui media dan forum lokal.

Pada tahun 2022, pemerintah menggulirkan wacana perluasan TPA Ngronggo sebagai solusi darurat. Namun, wacana ini justru menimbulkan konflik baru antara pemerintah dengan masyarakat karena masyarakat menilai pencemaran akan semakin luas dengan dilakukannya perluasan. Muncul pro-kontra di kalangan masyarakat, beberapa masyarakat menilai bahwa perluasan yang dilakukan adalah sebagai langkah darurat yang tidak bisa dihindari demi mengatasi permasalahan *overload capacity*.

Permasalahan persampahan Kota Salatiga terus belanjut pada tahun 2023-2024. Pada tahun 2023-2024 masyarakat terus mengeluhkan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan TPA Ngronggo. Masyarakat merasa dampak TPA Ngronggo telah mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Permasalahan TPA Ngronggo semakin memuncak pada tahun 2025 dimana daya tampung TPA sudah mencapai batas maksimal. Kondisi TPA yang semakin menghawatirkan membuat

masyarakat pada akhirnya melakukan aksi menghadang truk sampah pada 31 Juli 2025 - 1 Agustus 2025.

1. Konflik Realistik

Konflik terjadi karena adanya ketidaksepahaman dalam mencapai tujuan antara pemerintah dengan masyarakat berkaitan dengan keberlanjutan TPA Ngronggo Kota Salatiga. TPA Ngronggo Kota Salatiga saat ini mengalami keterbatasan lahan untuk menampung jumlah sampah seluruh masyarakat Kota Salatiga. Sehingga, pemerintah mengeluarkan sebuah wacana yaitu melakukan perluasan lahan di TPA Ngronggo. Namun, maksud pemerintah ini menuai berbagai respon di kalangan masyarakat. Ketidaksepahaman maksud pemerintah dengan keinginan masyarakat memunculkan konflik antara kedua pihak.

Konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat terkait perluasan TPA Ngronggo mencerminkan karakter utama konflik realistik menurut Lewis A. Coser, yaitu konflik yang berakar dari ketidaksepahaman tujuan antara pihak yang berkonflik. Pemerintah mengeluarkan wacana perluasan TPA karena kebutuhan teknis yang medesak yaitu terjadinya *overload capacity* sehingga wacana ini dianggap menjadi solusi. Namun, dari sisi masyarakat

memandang justru perluasan dipandang sebagai suatu ancaman terhadap kualitas hidup mereka.

2. Penyebab Konflik

a. *Triggers (Pemicu)*

Konflik yang terjadi antara pemerintah tidak muncul secara tiba-tiba melainkan karena adanya faktor pemicu yang menumpuk dan tidak terselesaikan dengan baik. Munculnya informasi mengenai wacana perluasan TPA tanpa pemberitahuan/ sosialisasi resmi menjadi pemicu yang memperdalam ketegangan. Masyarakat menilai bahwa wacana tersebut akan memperparah dampak yang mereka rasakan dan kekecewaan karena pemerintah tidak memberikan informasi walaupun rencana itu baru wacana.

Faktor lain dari konflik ini yaitu bau menyengat yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan tidak mendapatkan penanganan yang tuntas. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Padahal masyarakat sekitar TPA yang menanggung dampak yang besar dari keberadaan TPA. Janji-janji kompensasi yang tidak terealisasi

memperkuat kekecewaan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah.

b. *Pivotal factors or root causes* (Faktor inti atau penyebab dasar)

Konflik antara masyarakat sekitar TPA Ngronggo dengan pemerintah merupakan bentuk dari akumulasi dari akar permasalahan yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang lama. Konflik ini berkembang dari serangkaian kelalaian pemerintah dalam menangani isu-isu mendasar seperti bau menyengat, tumpukan sampah yang semakin menggunung, dan kondisi TPA yang dinilai sudah tidak layak. Faktor-faktor ini memunculkan keresahan, rasa tidak nyaman di kalangan masyarakat.

Wacana perluasan TPA yang muncul tanpa adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan pendapat memperdalam kekesalan masyarakat karena masyarakat merasa langkah tersebut akan memperburuk kelangsungan hidup mereka. Lemahnya komunikasi dua arah dan absennya ruang dialog menjadi bom waktu yang akhirnya meledak dalam bentuk aksi dan penolakan. Akar permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik menyebabkan konflik terus berulang terjadi.

c. *Mobilizing factors* (Faktor yang memobilisasi)

Konflik antara pemerintah dengan masyarakat berkembang menjadi konflik terbuka dengan ditandai adanya aksi seperti penutupan akses jalan utama menuju TPA Ngronggo. Akar permasalahan yang tidak tertangani secara serius dan terjadi berlarut-larut mendorong masyarakat bergerak melakukan aksi sebagai bentuk ekspresi atas kekecewaan terhadap pemerintah. Ketika ruang aspirasi publik tertutup dan tidak tersedia maka masayarakat membangun solidaritas untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka.

Aksi penutupan jalan utama ke TPA Ngronggo pada tanggal 31 Juli-1 Agustus 2025 menjadi simbol puncak dari ketidakpuasan yang telah dipendam selama bertahun-tahun. Tindakan ini tidak semata bentuk protes spontan tetapi mencerminkan adanya kesadaran solidaritas yang tumbuh di kalangan masyarakat. Rasa senasib akibat dampak yang selama ini mereka rasakan, seperti bau menyengat, kekhawatiran kesehatan dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan menumbuhkan kekompakkan masyarakat untuk bergerak dan bertindak bersama.

Konflik ini telah bergerak ke fase mobilisasi yang kuat, dimana masyarakat menjadikan solidaritas sebagai alat perjuangan untuk menuntut keadilan, partisipasi dan tanggung jawab pemerintah atas dampak yang selama ini telah mereka rasakan.

d. *Aggravating factors* (Faktor yang memperburuk)

Konflik yang terus berkembang dan memburuk karena adanya faktor yang memparah/memperburuk ketegangan. Permasalahan yang bersumber dari bau menyengat dan ketidaklayakan TPA, bertambah ke permasalahan-permasalahan lain yang muncul seriring berjalan waktu. Faktor-faktor seperti sampah yang tercecer dari truck pengangkut sampah hingga mengotori lingkungan, perilaku sopir truck sampah yang tidak sopan, pencemaran air sungai, serta ketidakkonsistenan jam operasional TPA menambah rasa frustasi masyarakat.

Faktor lain dari sisi pemerintah memperburuk situasi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia dan rusaknya fasilitas pengolahan sampah. Kondisi ini membuat pemerintah kesulitan dalam memenuhi tuntutan masyarakat seperti dalam hal kompensasi yang

tidak bisa terpenuhi karena keterbatasan anggaran. Kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah juga memperburuk kondisi TPA yang sudah memprihatinkan. Konflik TPA Ngronggo merupakan cerminan dari kegagalan tata kelola dan komunikasi publik yang efektif.

3. Resolusi Konflik

a. Memfasilitasi Dialog

Fasilitas dialog antara pemerintah dengan masyarakat belum dilakukan secara rutin sehingga komunikasi dua arah tidak berjalan dengan optimal. Ketiadaan dialog menyebabkan aspirasi dan keluhan masyarakat tidak tersampaikan dengan baik dan penutupan aspirasi menyebabkan ketegangan meningkat. Situasi ini menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat karena kurangnya komunikasi.

b. Negosiasi

Negosiasi yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat berlangsung karena adanya tekanan yaitu aksi penutupan jalan utama menuju TPA Ngronggo. Hasil negosiasi hanya memenuhi sebagian kecil tuntutan pemerintah sesuai dengan kesanggupan pemerintah untuk memenuhi.

c. Mediasi

Mediasi dilakukan dengan difasilitasi oleh DPRD Kota Salatiga sebagai pihak ketiga yang netral. Mediasi dilakukan sebanyak 1 kali. Namun, hasil mediasi tidak jauh berbeda dengan hasil negosiasi yang tidak bisa menyentuh akar permasalahan. Namun, mediasi yang dilakukan ini mampu menurunkan ketegangan dan tensi di kalangan masyarakat tetapi tidak mengubah dinamika konflik secara mendasar.

d. Arbitrase

Pada konteks konflik TPA Ngronggo, arbitrase belum dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah cenderung menggunakan negosiasi dan mediasi karena jika langsung pada keputusan yang mengikat dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi baru dari masyarakat. Pada saat ini fokus utama pemerintah lebih kepada meredam situasi agar lebih stabil.

KESIMPULAN

Kondisi TPA Ngronggo pada tahun 2024–2025 menunjukkan situasi yang semakin kritis akibat volume sampah yang melebihi kapasitas lahan seluas 5,4 hektare. Sistem controlled landfill yang seharusnya diterapkan tidak berjalan optimal dan cenderung bergeser menjadi praktik open dumping. Akibatnya, terbentuk gunungan

sampah setinggi sekitar 15 meter yang menimbulkan pencemaran udara, air, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah belum memiliki infrastruktur dan kapasitas operasional yang memadai untuk mengimbangi peningkatan timbulan sampah harian. Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat karena dampak yang dirasakan berlangsung dalam jangka waktu lama. Wacana perluasan TPA yang diajukan pemerintah justru memunculkan penolakan dari masyarakat. Dalam perspektif teori konflik Lewis A. Coser, konflik ini tergolong konflik realistik yang berakar pada ketidaksepahaman tujuan antara pemerintah dan masyarakat.

Ketegangan konflik semakin meningkat akibat bau menyengat, sampah yang tercecer dari truk pengangkut, ketidakstabilitan jam operasional, serta janji kompensasi yang tidak terealisasi. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dari pihak pemerintah turut menghambat upaya penanganan TPA secara optimal. Akumulasi keresahan tersebut mendorong masyarakat melakukan aksi penutupan akses jalan menuju TPA pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2025 sebagai bentuk protes. Pemerintah kemudian melakukan negosiasi dan mediasi yang difasilitasi DPRD Kota Salatiga, namun hasilnya belum menyentuh akar permasalahan.

Solusi yang ditawarkan masih bersifat sementara, seperti penyemprotan ecoenzim, peningkatan TPS3R, dan pembuatan biopori. Konflik terus berkembang karena lemahnya pendekatan dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi TPA Ngronggo tahun 2024–2025, dinamika konflik antara masyarakat dan pemerintah, serta upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pengelolaan TPA dan mencegah konflik serupa di masa mendatang, yakni:

1. Permasalahan overload tidak akan teratasi apabila volume sampah yang masuk ke TPA Ngronggo tetap tinggi. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga perlu mengintensifkan program pengurangan sampah dari hulu melalui pemilahan sampah mandiri di rumah, penguantan bank sampah, serta sosialisasi

pembuatan lubang biopori. Pengurangan sampah sejak sumbernya akan meringankan beban TPA sehingga pengelolaan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengelola sampahnya sendiri perlu disosialisasikan secara tegas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Penanganan sampah di TPA Ngronggo memerlukan anggaran yang besar karena membutuhkan pembaruan alat, mesin, penambahan pekerja dan pengolahan sampah. Sehingga DPRD Kota Salatiga harus memastikan bahwa alokasi dana mencukupi untuk kebutuhan peningkatan infrastruktur TPA. Apabila anggaran yang dimiliki memadai, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga dapat memaksimalkan penanganan TPA dan menangani *overload* yang terjadi. DPRD Kota Salatiga memiliki peran penting untuk memastikan bahwa anggaran lingkungan tidak dikurangi atau dialihkan kepada sektor lain karena penanganan permasalahan sampah menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.
3. Sistem *landfill* tidak lagi relevan untuk kota yang terus mengalami perkembangan misalnya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Sehingga, Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Kota Salatiga perlu mengkaji teknologi seperti *Waste to Energy* (WtE) atau *Refuse Derived Fuel* (RDF). *Waste to Energy* (WtE) adalah teknologi pengolahan sampah yang mengubah limbah yang tidak dapat di daur ulang menjadi bentuk energi yang berguna seperti panas, uap, listrik atau bahan bakar (biogas dan biodiesel).

DAFTAR PUSTAKA

- Abudssamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Afidah, U. (2025). TPA Ngronggo Jadi Titik Krusial Penanganan Sampah di Kota Salatiga. *BeritaJateng.id*. <https://beritajateng.id/salatiga/tapa-ngronggo-jadi-titik-krusial-penanganan-sampah-di-kota-salatiga/>. Diunduh pada 4 Desember 2025 pukul 13.00 WIB.
- Afidah. (2025). Hadang Truk Sampah, Wargaa Salatiga Keluhkan Bau Menyengat TPA Ngronggo. <https://beritajateng.id/berita/hadang-truk-sampah-warga-salatiga-keluhkan-bau-menyengat-tpa-ngronggo/>. Diunduh pada 2 September pukul 17.00 WIB.
- Afidah. (2025). Pemkot Salatiga Akan Pungut Retribusi Pembuangan Sampah di Semua TPS. <https://beritajateng.id/berita/pemkot-salatiga-akan-pungut-retribusi-pembuangan-sampah-di-semua-tps/>. Diunduh pada 3 September 2025 pukul 15.00 WIB.
- Alaina, Hawin. (2024). Tiap Hari Tampung 80 Ton Sampah, Umur TPA Ngronggo Salatiga Tersisa 3 Tahun. Dalam <https://regional.espos.id/tiap-hari-tampung-80-ton-sampah-umur-tpa-ngronggo-salatiga-tersisa-3-tahun-1976136>. Diunduh pada 10 September 2024 pukul 20.00 WIB.
- Alfitra. (2017). *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern: Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat*. Ponorogo: Wade Group.
- Alwi, Habib. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram: Institut Agama Islam (IAIN) Mataram.
- Asiah, Siti. (2017). *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Pustaka Cendekia.
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (2019). *Laporan Akhir Penyusunan Induk Persampahan Kota Salatiga* (hlm. 18). Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga.
- Benjamin., dkk. (2017). *Manajemen Konflik*. Bandar Lampung: AURA.
- Creswell, J. W. (2016). *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Dinas Lingkungan Hidup. (2025). Tiap Hari Tampung 80 Ton Sampah, Umur TPA Ngronggo Salatiga Tersisa 3 Tahun. *DLH Berita*.
- Fatih, Al Andy. (2017). *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Penelitian Deskriptif Kualitatif*. UNSIPRESS.
- Moleong.(2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Kita.
- Nafis, W. (2020). Penyelesaian Konflik Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul*, 20(3), 3699-3728.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CH. Harfa Creative.

- Noviyanto, H., & Fauzi, A. (2022). Prediksi Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Menggunakan Metode Least Square. *MAP (Mathematics and Applications) Journal*, 4(2), 155-162.
- Nurchayati. (2025). Kementerian LH RI Soroti Gunungan Sampah di TPA Ngronggo Salatiga, Rawan Longsor. Dalam [https://diswayjateng.com/disway-semarang/kementerian-lh-ri-soroti-gunungan-sampah-di\(tpa-ngronggo-salatiga-rawan-longsor.html](https://diswayjateng.com/disway-semarang/kementerian-lh-ri-soroti-gunungan-sampah-di(tpa-ngronggo-salatiga-rawan-longsor.html). Diunduh pada 2 September 2025 pukul 14.00 WIB.
- Nurdin, I. (2019). *Konflik dan Kolaborasi: Peran Negara Dalam Integrasi Bangsa*. Malang: Media Nusa Creative.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2045.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2026, Nomor 7 Tahun 2024 Peraturan Daerah Kota Salatiga II (2024).
- Permana, Krisiandi. (2025). Warga Sekitar TPA Ngronggo Protes Bau Menyengat Bertahun-tahun, Begini Solusi Wali Kota Salatiga. <https://regional.kompas.com/read/2025/08/01/135843378/warga-sekitar-tpa-ngronggo-protes-bau-menyengat-bertahun-tahun-begini?page=all>. Diunduh pada 2 September 2025 pukul 15.30 WIB.
- Rancangan Akhir RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045.
- Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga. (2025). Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga.
- Wirawan. (2009). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.